

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK DALAM RANGKA  
MENINGKATKAN PEROLEHAN SUARA PEMILU 2019 DI TINJAU  
DARI PASAL 31 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG  
PARTAI POLITIK (Studi di Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan  
Pembangunan Kota Malang**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Memperoleh Derajat Gelar S-2  
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Disusun Oleh :**

**IFAN TAUFIKURROHMAN**

**201710380211003**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**NOVEMBER 2019**

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK DALAM RANGKA  
MENINGKATKAN PEROLEHAN SUARA PEMILU 2019 DI TINJAU DARI  
PASAL 31 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG  
PARTAI POLITIK (Studi di Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan  
Pembangunan Kota Malang)**

Diajukan oleh :

IFAN TAUFIKURROHMAN

201710380211003

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, **Rabu / 22 Januari 2020**

Pembimbing Utama

  
**Dr. Sulardi, S.H., M.Si.**

Pembimbing Pendamping

  
**Dr. Fifik Wiryani, M.Si., M.Hum.**

  
Direktur  
Program Pascasarjana

  
**Prof. Akhsanul In'am, Ph.D**

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

  
**Mokh. Najih, S.H., M.H., Ph.D.**

# **T E S I S**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**IFAN TAUFIKURROHMAN**  
**201710380211003**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada hari/tanggal, Rabu/ 22 Januari 2020  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Malang

## **SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Dr. Sulardi, M.Si.**  
**Sekretaris : Dr. Fifik Wiryani, M.Si., M.Hum.**  
**Penguji 1 : Prof. Dr. Rahayu Hartini, M.Si., M.Hum.**  
**Penguji II : Dr. Surya Anogara, M.Hum.**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunianya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis yang berjudul: IMPLEMETASI PENDIDIKAN POLITIK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEROLEHAN SUARA PEMILU 2019 DITINJAU DARI PASAL 31 UU NOMOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK (Studi di Dewan Pimpinan Cabang PPP Kota Malang) Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Umat Islam Muhammad SAW sang revolusioner yang telah membawa umat islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Tesis ditulis dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister (S2) di Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari bahwa tesis dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan Tesis ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

- Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan secara moril dan materil yang tidak pernah putus doa dan kasih sayangnya untuk penulis.
- Dr. Sulardi, SH., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang sangat penulis hormati, penulis ucapkan banyak terimakasih karena membantu penulis menyelesaikan tugas akhir (Tesis) serta memberikan dorongan dan motivasi dan arahan.
- Rekan-rekan seperjuangan Magister Ilmu Hukum UMM 2017 utamanya Konsentrasi Hukum Tata Negara yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kata penulis mohon maaf jika dalam pembuatan tulisan ini penulis melakukan kesalahan. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Malang, 20 November 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Halaman Daftar Penguji .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vii
Pernyataan Orisinalitas .....	viii
Abstrak .....	ix
Abstrct .....	x
 Latar Belakang .....	 1
Rumusan Masalah.....	4
Pendidikan Politik .....	4
Partisipasi Politik .....	6
Tinjauan Partai Politik .....	6
Fungsi Partai Politik .....	7
• Sebagai Sosialisasi Politik .....	8
• Sebagai Rekrutmen Politik .....	8
• Sebagai Partisipasi Politik .....	8
• Sebagai Sarana Pengantur Konflik .....	9
Pendidikan Politik .....	9
Fungsi Pendidikan Politik .....	10
Tujuan Pendidikan Politik .....	11
Metode Penelitian .....	11
• Lokasi Penelitian .....	12
• Jenis Data .....	12

• Sumber Data .....	12
• Teknik Pengumpulan Data .....	13
• Teknik Analisis Data .....	13
Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	13
Implementasi Pendidikan Politik Partai Persatuan Pembangunan Kota Malang	13
Pendidikan Politik dalam Internal Partai (Kader) .....	17
Bidang Kaderisasi .....	18
• Pelatihan Saksi .....	20
• Seminar dan Dialog Interaktif (Perspektif Hukum dalam penyelenggaraan serta Kesiapan Penyelenggara dalam Pemilu Legislatif) .....	22
• Kajian (Dakwah Agama Oleh Partai Politik) .....	23
• Kegiatan sosial (Fooging/pemberantasan sarang nyamuk) .....	24
Pendidikan Politik Kepada Masyarakat (Eksternal Partai) .....	33
• Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula (Milenial) .....	35
• Sosialisasi Program PPP Berdasarkan Visi dan Misi Partai .....	36
• Kampanye Dengan Memanfaatkan Media Elektronik dan Atribut Lainnya	38
Penutup	
Kesimpulan .....	40
Saran .....	41
Daftar Pustaka .....	42

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019 Anggota DPRD Kota Malang ...	25
Tabel 2. Hasil Perolehan Kursi Legislatif Pemilu 2019 Anggota DPRD Kota Malang	26
Tabel 3. Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2014 Anggota DPRD Kota Malang ....	27
Tabel 4. Hasil Perolehan Kursi Legislatif Pemilu 2014 Anggota DPRD Kota Malang	28
Tabel 5. Target Perolehan Suara PPP Berdasarkan Lima Daerah Pemilihan Pemilu Legislatif 2019 Kota Malang .....	31



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **IFAN TAUFIKURROHMAN**

NIM : **201710380211003**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa:

- Tugas akhir penulisan hukum (Tesis) yang berjudul “ **IMPLEMETASI PENDIDIKAN POLITIK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEROLEHAN SUARA PEMILU 2019 DITINJAU DARI PASAL 31 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK (Studi pada DPC PPP Kota Malang)**” adalah karya tulis saya. Dalam naskah tugas akhir penulisa hukum ini tidak ada karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik diperguruan tinggi lain, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian atau keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dari daftar pustaka.
- Apabila ternyata didalam tugas akhir penulisan hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia tugas akhir penulisan hukum ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Tugas akhir penulisan hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.
- Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 Januari 2020

Yang menyatakan



**IFAN TAUFIKURROHMAN**



**IMPLEMETASI PENDIDIKAN POLITIK DALAM RANGKA  
MENINGKATKAN PEROLEHAN SUARA PEMILU 2019 DITINJAU DARI  
PASAL 31 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI  
POLITIK (Studi pada DPC PPP Kota Malang)**

**IFAN TAUFIKURROHMAN**

[ivantaufik88@gmail.com](mailto:ivantaufik88@gmail.com)

**Dr. Sulardi, S.H., M.Si (NIDN. 0012076402)**

**Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum (NIDN. 0028056701)**

**Abstrak**

Partai politik merupakan organisasi yang bersifat Nasional dan merupakan salah satu elemen penting dalam negara demokrasi. Partai politik sebagai institusi politik bertanggung jawab memberikan pendidikan politik kepada kader serta masyarakat umum. Partai politik merupakan salah satu alat untuk bisa menduduki jabatan-jabatan publik mulai dari eksekutif sampai dengan legislatif. Pendidikan politik merupakan salah satu cara atau usaha untuk mewujudkan negara demokrasi yang baik dan berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan mengetahui bagaimana pelaksanaan atau implemetasi pendidikan politik yang dilakukan oleh DPC PPP Kota Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu metode yuridis sosiologis, dengan mengambil lokasi penelitian di Kantor DPC PPP Kota Malang. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan studi pustaka untuk bahan analisa. Teknik analisa data yang dipergunakan adalah diskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan atau implementasi pendidikan politik oleh PPP Kota Malang belum begitu maksimal baik untuk kader maupun untuk masyarakat luas. Pendidikan politik yang dilaksanakan hanya menjelang agenda besar yaitu menjelang Pemilu baik Pilkada, Pileg dan Pilpres. Materi pendidikan politik yang disuguhkan partai politik masih kurang begitu maksimal atau kurang aplikatif. Hal ini berdampak pada perolehan suara PPP Kota Malang pada Pemilu 2019 menurun drastis bahkan sampai kehilangan lebih dari 50% suara dibandingkan pada perolehan suara pada pemilu 2014. Selain itu juga berdampak pada kualitas kader PPP dalam menjalankan fungsi dan tujuan partai, serta berpengaruh pada tingkat partisipasi politik masyarakat dalam memberikan hak politiknya.

Kata Kunci: Partai Politik, Pendidikan Politik, Perolehan Suara.

***IMPLEMENTATION OF POLITICAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF  
INCREASING VOTES FOR THE 2019 ELECTIONS IN TERMS OF ARTICLE  
31 OF LAW NUMBER 2 OF 2011 CONCERNING POLITICAL PARTIES (Study  
at Malang City DPC PPP)***

**IFAN TAUFIKURROHMAN**

[ivantaufik88@gmail.com](mailto:ivantaufik88@gmail.com)

**Dr. Sulardi, S.H., M.Si (NIDN. 0012076402)**

**Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum (NIDN. 0028056701)**

***Abstract***

*Political parties are national organizations and are an important element in a democratic country. Political parties as political institutions are responsible for providing political education to cadres and the general public. Political parties are one tool to be able to occupy public positions ranging from executive to legislative. Political education is one way or effort to create a good and quality democratic country. This study aims to discuss and find out how the implementation or implementation of political education conducted by DPC PPP Malang. The method used in this legal research is the sociological juridical method, by taking the location of the research in the Malang City DPC PPP Office. The data in this study were obtained from interviews and literature studies for analysis. The data analysis technique used is descriptive qualitative. The results showed that in the implementation or implementation of political education by PPP Malang City was not so optimal both for cadres and for the wider community. Political education is carried out only before the big agenda, namely before the general election, both the regional head election, legislative election and presidential election. Political education material presented by political parties is still not very optimal or less applicable. This has an impact on the vote acquisition of PPP Malang City in the 2019 Elections has decreased dramatically and even lost more than 50% of the votes compared to the votes in the 2014 elections. It also has an impact on the quality of PPP cadres in carrying out the functions and objectives of the party, as well as influencing the level of political participation of the community in giving political rights.*

***Keywords: Political Parties, Political Education, Voting.***

## Latar Belakang

Partai politik merupakan sebuah institusi yang mutlak diperlukan dalam sistem demokrasi, apabila sudah memilih sistem demokrasi dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara maka salah satu instrument penting dalam demokrasi adalah institusi partai politik. Tanpa partai politik maka demokrasi tidak bisa bekerja dengan baik. Oleh karena itu, hidupnya demokrasi sangat tergantung pada hidup dan berkembangnya partai politik. Partai politik merupakan salah satu pilar dalam demokrasi. Dengan adanya partai politik, aspirasi dan keinginan dari rakyat dapat tersalurkan dengan baik.<sup>1</sup> Undang-undang Dasar Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi, partai politik merupakan sarana dalam meraih atau menduduki suatu jabatan atau kekuasaan yang konstitusional. Dalam sistem demokrasi tercakup hak-hak sebagai warga negara yang dilindungi oleh negara seperti hak mengeluarkan pendapat, hak berkumpul dan hak berorganisasi.

Berbagai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah merupakan produk politik. Salah satu fungsi di bentuknya partai politik adalah memberikan pemahaman dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat luas. Dalam sistem demokrasi partai politik merupakan alat untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Melalui Pendidikan politik yang baik dapat mewujudkan demokrasi yang baik dan berkualitas. Pendidikan politik sangat berpotensi untuk membentuk watak, karakter, dan tanggung jawab warga negara yang demokratis sehingga dapat mencapai tujuan bangsa yang lebih beradab. Peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik menjadi lebih penting karena memiliki peran sebagai alat distribusi nilai kebangsaan bagi generasi muda yang memiliki posisi tawar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidika politik sangat penting untuk di selenggarakan.

Sebagaimana diatur di dalam Undang-undang No. 02 Tahun 2011 Pasal 31a dan 31b, 31a “Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan

---

<sup>1</sup> Miiirriam Budiarjo, *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama. 2008

gender dengan tujuan antara lain: a). Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; b). Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; c). Meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>2</sup>

Sekarang ini keadaan politik di Indonesia tidak seperti apa yang diinginkan, karena seluruh partai politik baik yang lama maupun yang baru berdiri kurang maksimal dalam memberikan pendidikan politik.<sup>3</sup> Hal ini bisa terjadi seperti maraknya *money politic*, angka golput tinggi karena kurang kesadaran masyarakat dalam memberikan haknya dalam menyalurkan suara.<sup>4</sup> Dengan demikian masalah-masalah mengenai perpolitikan yang berhubungan dengan pemilihan sangat kompleks sehingga masyarakat dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lebih tentang politik. Partai politik mempunyai kewajiban dalam mencerdaskan masyarakat seperti yang diatur dalam Undang-undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, bahwa partai politik mempunyai kewajiban untuk melakukan kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat.

Kualitas demokrasi kita tercermin dalam kesadaran dan kedewasaan dalam berpolitik. Kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.<sup>5</sup> Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa masyarakat menaruh perhatian lebih terhadap masalah bangsa dan negara dalam pembangunan.<sup>6</sup>

Perjalanan kehidupan politik di Indonesia memberikan gambaran bahwa empat masalah yang perlu dikaitkan kepada pembicaraan mengenai bagaimana partai politik mengorganisir dirinya. Unsur-unsur tersebut adalah bagaimana hubungan antara partai dengan masyarakat pendukung partai, peranan ideologi di dalam kehidupan partai untuk memperoleh sarana materiil, yang penting pula perannya

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik

<sup>3</sup> Naning Ramdlang, *Pendidikan Politik dan Regenerasi*, Jakarta: Liberty, 1982.

<sup>4</sup> Hermawan C, I, (2011). *Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik*. K@ta: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 36 (19), pp.66-75

<sup>5</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta:PT Gramedia, 2007

<sup>6</sup> Ibid.,

bagi kelancaran perputaran mesin partai.<sup>7</sup> Dalam pemilihan umum baik pemilihan umum legislatif ataupun pemilihan eksekutif (Presiden dan Kepala Daerah) partai harus bisa menyederhanakan dan menyajikan pilihan-pilihan bagi para pemilihnya, mendidik masyarakat luas dan menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam partai.

Terkait dengan bagaimana partai politik meraih perolehan suara atau dukungan massa, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah partai politik yang berasaskan islam dan bersifat nasional, dengan hal itu Partai Persatuan Pembangunan menyasar warga nahdliyin untuk ikut aktif berpartisipasi pada partai ini. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah partai politik yang merupakan hasil gabungan atau Fusi Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Partai Syarikat Islam (PSII) yang berasaskan islam, bersifat atau wawasan nasional, berorientasi keumatan, kerakyatan, dan keadilan, serta berupaya untuk mengembangkan tatanan budaya dan perilaku politik islam dalam wadah negara kesatuan republik indonesia.<sup>8</sup>

Partai politik yang dulunya berlambang bintang ini jelas mengandalkan kekuatannya dalam menggalang massa didasarkan atas hubungan emosional keagamaan. Primordialisme agama adalah menjadi jembatan yang ampuh antara massa dan elit partai, seperti halnya dalam pemilihan umum sebelumnya tak ada program yang ditawarkan, karena berbagai keterbatasan faktor pendukungnya, PPP dalam pemilihan umum sebelumnya tampil dengan persiapan yang sangat memprihatinkan. Dikecamatan hingga desa dan dusun tidak semuanya terdapat struktur kepemimpinan, kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan secara rutin untuk mendidik dan melibatkan rakyat hampir bisa dipastikan tidak ada sama sekali.<sup>9</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, menurut pendapat penulis partai politik sangat berperan penting dalam melaksanakan pendidikan politik, sehingga partai politik nantinya akan diisi oleh generasi atau kader-kader yang handal, selain itu pejabat negara yang dihasilkan atau dilahirkan dari partai politik bisa berkualitas dalam

---

<sup>7</sup> Arbi Sanit.2003. *Sistem Politik Indonesia*.Jakarta: PT Raja Grafindo. Hal.23-24.

<sup>8</sup> Daniel Dhakidea. 2004. *Partai-partai Poitik Indonesia Ideologi dan Program 2004-2009*. Jakarta: Kompas Media Nusantara. Hal 101.

<sup>9</sup> M. Rusli Karim.1983. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali. Hal,204.

menjalankan roda pemerintahan. Untuk itu supaya bisa menghasilkan output yang baik dan berkualitas maka Implementasi pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi politik perlu diidentifikasi, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Implementasi Pendidikan Politik Dalam Rangka Meningkatkan Perolehan Suara Pemilu 2019 Ditinjau Dari Pasal 31 Undang-undang No 02 Tahun 2011** (Studi di Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Malang).

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah yaitu “ bagaimana bentuk-bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan oleh DPC PPP Kota Malang dalam rangka meningkatkan perolehan suara pemilu 2019?

### **Pendidikan Politik**

Pendidikan politik merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa sebagai upaya edukatif yang intensional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu yang sadar politik dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis/moril dalam mencapai tujuan-tujuan politik.<sup>1</sup> Pendidikan politik merupakan aktifitas pendidikan diri (mendidik dengan sengaja diri sendiri) yang terus menerus berlangsung dalam diri seseorang, sehingga orang yang bersangkutan lebih mampu memahami dirinya sendiri dan situasi-kondisi lingkungan sekitarnya.<sup>1</sup>

Mengidentifikasi pendidikan politik dalam arti kata yang longgar yaitu sosialisasi politik. Disenangi ataukah tidak, diketahui ataukah tidak, disadari ataukah tidak hal itu dialami oleh anggota-anggota masyarakat, baik penguasa atau orang awam. Jadi kalau boleh disimpulkan, pendidikan politik dapat diartikan usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi masyarakat dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil penghayatan itu akan melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal itu, dan bersamaan dengan itu lahir pula kebudayaan politik baru.

---

<sup>1</sup> Kartini Kartono, *Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*, Jakarta: Mandar Maju, 2009:64

<sup>1</sup> Ibid:65

Sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma dan simbol-simbol politik negaranya dari bebrbagai pihak dalam sistem politik seperti pemerintah, partai politik dan sekolah.<sup>1</sup>

2

Pendidikan politik dianggap penting oleh hampir semua lapisan masyarakat dan menentukan perilaku politik seseorang. Pendidikan politik digunakan sebagai alat untuk mempertahankan sikap dan norma politik, serta meneruskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, baik melalui akulturasi informal maupun melalui pendidikan yang direncanakan untuk menunjang stabilitas sistem politik.<sup>1</sup>

3

Menurut Brownhil dan Smart (1989) menarik sebuah proposisi bahwa pendidikan politik adalah proses pendidikan untuk membina seseorang agar mampu menilai, memahami, dan mengambil keputusan tentang berbagai masalah dengan cara-cara yang tepat dan rasional, termasuk dalam menghadapi masalah yang bias maupun isu-isu yang bersifat kontroversial. Pengetahuan politik seseorang akan membawa orang tersebut untuk berada pada tingkat partisipasi politik tertentu.<sup>1</sup>

Pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi. Bentuk-bentuk pendidikan politik dapat dilakukan melalui: a. Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, buku, jurnal dan alin-lain bentuk publikasi massa yang bisa membentuk pendapat umum; b. Siaran radio dan televisi serta film; c. Asosiasi atau lembaga dalam masyarakat seperti gereja, masjid, atau tempat menalurkan khutbah, dan juga lembaga pendidikan formal dan informal.<sup>1</sup>

5

## Partisipasi Politik

Kegiatan seorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara

---

<sup>1</sup> Ramlan Surbakti, 2010. *Memahâmi Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo. Hal 179

<sup>1</sup> Sanit. 2003. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

<sup>1</sup> Harapandi dan Mansur, 2006. *Pendidikan Politik*. Jakarta: Pustaka Irfani.

<sup>1</sup> Rusadi Kantraprawira. 2004. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Sinar Baru.

langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau (*lobbying*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai, atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*-nya dan sebagainya.<sup>1</sup> 6

Bahwa partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan politik.<sup>1</sup> selanjutnya, Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No Easy Choice: Political participation in developing Countries*, menyebutkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan politik oleh pemerintah. partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantab atau sporadis, secara damai atau kekerasan legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.<sup>1</sup> 8

### **Tinjauan Partai Politik**

Pada dasarnya partai politik merupakan suatu kelompok masyarakat yang terorganisir yang anggotanya memiliki orientasi dan cita-cita yang sama. Tujuan partai politik adalah untuk mempersiapkan atau mencetak kader yang berkualitas untuk bisa menduduki jabatan-jabatan politik yang konstitusional. berikut partai politik menurut para ahli:

Menurut Carl J. Friedrich partai politik yaitu sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil dan materiil.<sup>1</sup> 9

Sedangkan menurut Sigmund Neumann dalam buku karyanya *Modern Political Parties* mengemukakan partai politik adalah organisasi dari aktifitas-aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat

---

<sup>1</sup> Mirriam Budiarjo.2008.*Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal 367

<sup>1</sup> Ibid, 367

<sup>1</sup> Samuel P Huntington dan Joan M.Nelson, *No Easy Chice: Political Participation in Dveloping Countries* (Cambridge, Mass: Havard University Press, 1977), hal 3).

<sup>1</sup> Mirriam Budiarjo.2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal 404



atas dasar persaingan dengan suatu golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.<sup>2</sup>

0

Menurut Lapalombara dan Weiner partai politik adalah organisasi politik yang mempunyai kegiatan yang bersinambungan. Artinya, masa hidupnya tak bergantung pada masa jabatan atau masa hidupnya para pemimpinnya. Organisasi yang terbuka dan permanen tidak hanya ditingkat lokal.<sup>2</sup>

1

### **Fungsi Partai Politik**

Fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum, sedangkan cara yang digunakan partai tunggal dalam sistem politik totaliter berupa paksaan fisik dan psikologik oleh suatu diktatorial kelompok (komunis) maupun diktatorial individu (fasis).<sup>2</sup> Dibagian terdahulu telah disinggung bahwa ada pandangan yang berbeda secara mendasar mengenai partai politik di negara yang demokratis dan dinegara yang otoriter. Perbedaan pandangan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan tugas atau fungsi partai di masing-masing negara. Negara demokrasi partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahiran, yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingan dihadapan penguasa. Sebaliknya di negara otoriter, partai tidak dapat menunjukkan harkatnya, tetapi lebih banyak menjalankan kehendak penguasa.<sup>2</sup> Berikut diuraikan secara lebih lengkap fungsi partai politik antara lain:

### **Sebagai Sosialisasi Politik**

Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi inilah para anggota-anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh

---

<sup>2</sup> Ibid., 0

<sup>2</sup> Ramlan Surbakti. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo. Hal 148

<sup>2</sup> Ibid., 2

<sup>2</sup> Mirriam Budiarjo. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Hal 405

secara sengaja melalui pendidikan formal, non formal dan informal maupun tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga dan tetangga maupun dalam kehidupan masyarakat.<sup>2</sup> 4

### **Fungsi Rekrutmen Politik**

Fungsi partai politik berikutnya yaitu fungsi rekrutmen dimana partai politik melakukan penyeleksian seseorang atau kelompok orang untuk dapat melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik dan pemerintahan. Ini merupakan sarana bagi partai politik untuk mempersiapkan dan melatih kader partai politik untuk maju menjadi calon pemimpin bangsa. Partai politik mencari dan mengajak orang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Partai politik seharusnya dapat melakukan mekanisme rekrutmen politik yang dapat menghasilkan pelaku politik yang berkualitas dimasyarakat.<sup>2</sup> 5

### **Sebagai Partisipasi Politik**

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang biasanya dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud antara lain: mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik, dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum.<sup>2</sup> 6

### **Sebagai Sarana Pengatur Konflik**

Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, apalagi dimasyarakat yang bersifat heterogen, apakah dari segi etnis (suku bangsa), sosial ekonomi, ataupun agama. Setiap perbedaan itu menyimpan potensi konflik. Apabila keaneka ragaman itu terjadi di negara yang menganut paham demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dianggap hal yang wajar dan mendapat tempat. Akan tetapi di dalam negara yang sifatnya heterogen potensi pertentangan lebih besar dan dengan mudah mengundang konflik.<sup>2</sup> 7

---

<sup>2</sup> Ramlan Surbakti. 2010. *Memahami ilmu politik*. Jakarta: PT Grasindo, 149-150

<sup>2</sup> Imam Hidajat. 2009. *Teori-teori Politik*. Malang: Setara Pres

<sup>2</sup> Ibid.,

<sup>2</sup> Firmansyah HI, 2008. *Pengelolaan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

## Pendidikan Politik

Istilah pendidikan politik adalah gabungan dari dua kata, yakni pendidikan dan politik. “inti kegiatan pendidikan sebenarnya, selain menyangkut proses-proses belajar, juga menyangkut *conditioning* dan *reinforcement* terhadap masyarakat”. Sehingga dengan demikian pendidikan adalah merupakan proses belajar seseorang tentang sesuatu serta mempersiapkan kondisi dan situasi lingkungan yang dapat menghasilkan rangsangan yang akan menghasilkan reaksi atau respon tertentu. Apabila dihadapkan pada konsep pendidikan politik, maka belajar tentang sesuatu diatas diartikan belajar tentang politik konsep pendidikan politik dan sosialisasi politik memiliki arti yang berdekatan atau hampir sama sehingga dapat digunakan secara bergantian.<sup>2</sup>

8

Pendidikan politik disebut pula sebagai *political forming* atau *politische bildung*. Disebut “forming” karena terkandung intensi untuk membentuk insan politik yang menyadari status/kedudukan politiknya di tengah masyarakat. Dan disebut “bildung” (pembentukan atau pendidikan diri sendiri), karena istilah tersebut menyangkut aktifitas: membentuk diri sendiri, dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab sendiri untuk menjadi insan politik. Pendidikan politik pada hakekatnya merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa. Pendidikan macam ini tidak menonjolkan proses kultivasi individu menjadi “intelektual politik” yang bersinggasana dalam menara gading keilmuan, atau menjadi pribadi kritis dan cerdas yang terisolasi dari masyarakat lingkungannya. Akan tetapi lebih menekankan relasi individu dengan individu lain, atau individu dengan masyarakatnya di tengah medan sosial, dalam satu konteks politik, dengan kaitanya pada aspek-aspek sosial-ekonomi-budaya; di tengah situasi-situasi konflik yang ditimbulkan oleh bermacam-macam perbedaan, atau oleh adanya pluriformitas (kemajemukan masyarakatnya).<sup>2</sup> Beberapa definisi mengenai pendidikan politik adalah sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Ustman Abdul.2001. *Pendidikan Politik Ikwanul Muslimin*. Jakarta:Intermedia

<sup>2</sup> Kartini Kartono. 2009. *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: CV Mandar Maju

1. Pendidikan politik adalah bentuk pendidikan orang dewasa dengan menyiapkan kader-kader untuk pertarungan politik dan mendapatkan penyelesaian politik, agar menang dalam perjuangan politik.
2. Pendidikan politik adalah upaya edukatif yang intensional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik, dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis/moril dalam mencapai tujuan-tujuan politik.
3. R. Hayer menyebut pendidikan politik adalah usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik.

### **Fungsi Pendidikan Politik**

Pendidikan politik mempunyai dua fungsi utama yaitu dalam merubah atau membentuk tata laku pribadi individu dan yang kedua lebih luas lagi yaitu membentuk suatu tatanan masyarakat yang diinginkan tuntutan politik. Bahwa pendidikan politik dapat memberikan sumbangan besar bagi:

1. Proses demokrasi yang semakin maju dari semua individu (rakyat) dan masyarakat/struktur kemasyarakatannya.
2. Dengan prinsip-prinsip realistik, lebih manusiawi dan berlandaskan.

Fungsi pendidikan diatas lebih menekankan fungsinya dalam merubah tatanan masyarakat agar lebih baik dari sebelumnya yang ditandai dengan adanya perubahan sikap dari individu-individu dalam masyarakat tersebut, yang lebih mendukung proses demokrasi. Sedangkan fungsi pendidikan bagi individu sendiri yaitu, meningkatkan kemampuan individual supaya setiap orang mampu berpacu dalam lalu lintas kemasyarakatan yang menjadi semakin padat penuh sesak dan terpolusi oleh dampak bermacam-macam penyakit sosial kedurjanaaan. Disamping mengenai kekuasaan, memahami mekanismenya, ikut mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan kekuasaan di tengah masyarakat.<sup>3</sup> .

### **Tujuan pendidikan politik**

Pendidikan politik merupakan proses mempengaruhi individu agar dia memperoleh informasi lebih lengkap, wawasan lebih jernih, dan ketrampilan politik

---

<sup>3</sup> Ibid.,

yang lebih tinggi, sehingga dia bisa bersikap kritis dan lebih intensional/terarah hidupnya. Juga diharapkan menjadi warga negara yang lebih cerdas.

1. Membuat rakyat mampu memahami situasi sosial politik penuh konflik.
2. Berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang kurang baik.
3. Aktifitasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu atau perorangan, dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara.
4. Sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkorelasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.
5. Mengembangkan semua bakat dan kemampuannya (aspek kognitif, wawasan, kritis, sikap positif, ketrampilan politik).
6. Orang bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik, demi membangun diri, masyarakat sekitar bangsa dan negara.<sup>3</sup>

### **Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis Sosiologis. dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tertulis. Penelitian ini secara langsung meneliti tentang implementasi pendidikan politik dalam rangka meningkatkan perolehan suara pemilu 2019 oleh Partai Persatuan Pembangunan di Kota Malang.

### **Lokasi Penelitian**

Penulis memilih penelitian ini dilaksanakan di Kota Malang yaitu tepatnya di Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan. Dipilihnya lokasi tersebut dikarenakan pertimbangan beberapa kali pemilu suara Partai Persatuan Pembangunan di Kota Malang selalu stagnan bahkan menurun.

### **Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi data yang berupa hasil wawancara dan observasi yang berbentuk pengalaman, pendapat, pernyataan yang diperoleh dari keterangan nara

---

<sup>3</sup> Ibid.,

sumber atau responden. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumentasi, notulensi terkait hasil penelitian penulis dan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
4. AD/ART Partai Persatuan Pembangunan

### **Sumber Data**

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh berupa pengalaman, pendapat dan pernyataan dari responden langsung yang terkait dengan implementasi pendidikan politik dalam rangka meningkatkan perolehan suara pemilu 2019 Partai Persatuan Pembangunan di Kota Malang. Diantaranya sebagai berikut:

1. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Malang.
2. Sekertaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Malang.
3. Kader Partai Persatuan Pembangunan Kota Malang (PAC PPP Kota Malang)

Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari penelusuran:

1. Dokumen yang dimiliki kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Malang.
2. Perpustakaan pusat Universitas Muhammadiyah Malang
3. Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang
4. Perpustakaan Kota Malang
5. Penelusuran di internet.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: Wawancara, Mengumpulkan dokumentasi kegiatan serta mengumpulkan literatur-literatur baik yang diperoleh melalui buku-buku, teks, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan isu penelitian ini dan Penelusuran di internet

## **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini, yaitu dengan deskriptif kualitatif, dengan pengertian bahwa data-data yang dihasilkan akan memberikan gambaran yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Implementasi Pendidikan Politik Partai Persatuan Pembangunan Kota Malang**

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.<sup>3</sup> Menurut pasal 1 angka (4) Undang-undang No. 2 Tahun 2011, pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>3</sup> Partai politik diwajibkan memberikan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya sebagaimana diatur dalam pasal 13 huruf e Undang-undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.<sup>3</sup>

Sesuai dengan Pasal 31 Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik \, tujuan dari partai politik dalam pendidikan politik bagi masyarakat yaitu, *pertama* meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. *Kedua*, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. *Ketiga*, meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dimana pendidikan politik tersebut dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

<sup>3</sup> Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik.

<sup>3</sup> lihat pasal 13 huruf e Undang-undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

<sup>3</sup> Pasal 31 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Pentingnya pendidikan politik bagi semua warga negara Indonesia, maka menjadi harapan kita semua adalah agar pendidikan politik yang diterapkan di Indonesia ini khas bersumber pada aspirasi yang digali dari kepribadian dan kekayaan spritual bangsa sendiri dan telah disepakati secara nasional, demi tegaknya Republik Indonesia, dan demi tercapainya tujuan-tujuan politik negara, yang pada hakekatnya merupakan pencerminan murni dari harapan dan aspirasi bangsa/rakyat Indonesia.<sup>3</sup> Jika pendidikan politik ini kemudian dibangun dalam satu struktur kemasyarakatan tertentu, misalnya dalam organisasi sosial, partai, serekat pekerja, angkatan bersenjata dan lain-lain, maka syarat utama pengadaan lembaga-lembaga pendidikan politik adalah otonomi atau kemandirian.<sup>3</sup> 7

Kemandirian dari pendidikan politik ini tidak dijamin secara cukup, lembaga tersebut condong jadi berbahaya, dan dijadikan alat untuk mengindoktrinasikan ide-ide para penguasa guna menggiring masa, dan melumpuhkan aktifitas serta kreatifitas rakyat atau hanya dijadikan hiasan dari struktur-struktur kenegaraan yang tidak demokratis. Kemudian dijadikan alat untuk memanipulasi dan mengeksploitir rakyat. Oleh karena itu pendidikan politik juga harus berisikan ajaran untuk berani mendobrak banyak kepincangan dimasyarakat yang menimbulkan kesengsaraan pada rakyat, mengarah ketingkat demokrasi sejati dan demokrasi vital. Pendidikan politik juga mengembangkan daya kritis masyarakat, disamping juga menunjukkan kemungkinan-kemungkinan untuk memfungsikan semua lembaga politik dan kemasyarakatan secara lebih pragmatis dan lebih efisien. Diawali dengan mawas segala kekurangan, kelemahan dan kesalahan-kesalahan dimasa lampau, kemudian mengoreksinya dengan cara-cara baru yang tepat, mengarah pada inovasi. Ringkasnya pendidikan politik harus bisa meningkatkan proses demokratisasi dari masyarakat untuk bangsa.

Pendidikan politik dilaksanakan berkaitan dengan kegiatan:

- a. Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara, yaitu pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

---

<sup>3</sup> Djakfar, Y. 2009. *Pendidikan Pblitik warga negara dalam menciptakan demokrasi yang berkualitas*. Jurnal online dinamika. 2 (3), hal. 41

<sup>3</sup> Kartono, K. 2009. *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: Mandar Maju



- b. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik.
- c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.<sup>3</sup>

Partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan kesetaraan gender dengan tujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>3</sup>

Bentuk-bentuk dalam kegiatan pendidikan politik antara lain yaitu Seminar

- a. Dialog Interaktif
- b. Pelatihan
- c. Kegiatan sosial
- d. Workshop.<sup>4</sup>

PPP Kota Malang merupakan partai lama dan bisa dikatakan partai senior dalam kancah perpolitikan lokal tingkat Kota maupun tingkat nasional. Sejak PPP muncul pada tahun 1973 yang pada waktu itu PPP Kota Malang dipimpin oleh KH. Hasyim Muzadi. Kalau dilihat dari sejarah atau historis PPP Kota Malang sungguh matang dalam segi usia dan pengalaman, namun kenyataan dalam hasil pemilihan umum Kota Malang pada pemilu tahun 1997 yang pada waktu itu diikuti oleh dua partai politik (Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia) serta satu Golongan Karya. Suara kursi yang di peroleh PPP Kota Malang pada waktu itu memperoleh 15 kursi, untuk pemilu tahun 1999 PPP Kota Malang hanya memperoleh 1 kursi di DPRD Kota Malang, hal ini pun juga terjadi pada Pemilu

<sup>3</sup> Lihat Pasal 34 Ayat (3b) 8

<sup>3</sup> Lihat Pasal 31 angka (1) 9

<sup>4</sup> Naning, Ramlan, 1982. *Pendidikan Politik dan Regenerasi*, Jakarta: Liberty

tahun 2004 memperoleh 1 kursi, sedangkan hal yang memprihatinkan pada pemilu tahun 2009 PPP Kota Malang tidak mendapatkan kursi DPRD. Namun pada pemilu 2014 PPP memperoleh 3 kursi dan untuk pemilu serentak (Eksekutif-legislatif) pada tanggal 17 april 2019 PPP Kota Malang mengalami keterpurukan lagi yaitu tidak mendapatkan kursi sama sekali.<sup>4</sup>

1

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam pengelolaan negara. Dewasa ini partai politik sudah sangat akrab dilingkungan kita. Sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Di era demokrasi seperti saat ini partai sangat diperlukan, namun saat ini kepercayaan masyarakat terhadap partai politik semakin turun drastis ditandai dengan kualitas kader yang menurun, pengisian jabatan struktural partai yang kurang baik, manajemen partai yang buruk dan angka golput juga semakin tinggi. Hal ini Partai persatuan pembangunan Kota Malang mempunyai visi yaitu “ *Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, bermoral, sejahtera, beretika, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman*”. (Program Perjuangan PPP Kota Malang).

Untuk melaksanakan tugas dan perjuangan partai serta untuk tercapainya visi dan misi PPP Kota Malang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan Implementasi pendidikan politik PPP. Pada dasarnya partai politik merupakan salah satu kendaraan politik untuk menyerap aspirasi dan keinginan dari masyarakat seperti motto partai persatuan pembangunan yaitu mengabdikan dan melayani umat serta kembali ke khithah rumah besar umat islam. Terkait hal ini, peneliti akan menggambarkan dan menganalisa terkait dengan implementasi pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai persatuan pembangunan Kota Malang berdasarkan data-data yang diperoleh melalui pengamatan maupun hasil wawancara. Adapun implementasi pendidikan politik partai persatuan pembangunan meliputi pendidikan politik di internal partai (kader) dan eksternal partai (masyarakat umum) yang meliputi beberapa point dibawah ini:

---

<sup>4</sup> Harian Republika, 2019. <http://m.republika.co.id/amp/pr0ax3428>

### **Pendidikan Politik dalam Internal Partai (Kader)**

Setiap partai politik mempunyai aturan tertinggi yang berupa Anggaran Dasar (AD) yang merupakan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan dibawahnya dalam setiap aktivitas politik. Sedangkan Anggaran Rumah Tangga (ART) aturan untuk menjabarkan mengenai kandungan dari Anggaran Dasar partai politik. Mengenai pendidikan politik utamanya bagi anggota internal partai dan untuk melaksanakan perintah AD/ART partai perlu adanya program kerja yang baik yaitu program kerja yang dijadikan patokan dasar dalam pelaksanaan aktifitas politik.

Program kerja PPP salah satunya berkaitan dengan pendidikan politik yaitu kegiatan dengan pembinaan anggota internal atau kader partai dimulai dari posisi atau tingkatan struktur organisasi terendah yaitu tingkat Desa/Ranting sampai pada tingkat nasional atau pusat. Program kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan politik DPC PPP Kota Malang meliputi berbagai kegiatan antara lain bidang kaderisasi, kebijakan publik, pembangunan keummatan. Kegiatan tersebut disusun dalam program kerja partai yang direncanakan dalam program jangka bulanan dan program tahunan. Berikut ini mengenai program kerja DPC PPP Kota Malang berkaitan dengan program pendidikan politik.

#### **Bidang Kaderisasi.**

Diskursus tentang partai politik menyangkut bagaimana fungsi partai politik tersebut bisa berjalan dengan maksimal di suatu Negara. Dalam sistem demokrasi seperti di negara ini partai politik memiliki peran dan fungsi yang harus dilaksanakan salah satunya yaitu kaderisasi atau rekrutmen politik, sebab tanpa adanya rekrutmen parpol tidak memiliki kader-kader yang handal serta berkualitas untuk diajukan dalam kontestasi politik baik ditingkat nasional ataupun tingkat daerah atau lokal. Fungsi rekrutmen politik oleh partai politik yaitu proses partai politik mencari dan menyeleksi calon anggota baru yang dianggap mumpuni untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik. Sejalan dengan fungsi rekrutmen politik maka secara tidak langsung berjalan pula proses kaderisasi. Rekrutmen dan kaderisasi politik seharusnya dilakukan oleh seluruh partai politik secara terus menerus, dengan demikian akan tercipta kader-kader yang punya wawasan luas tentang politik, cerdas, berintegritas dan bebas dari korupsi.

Rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik tidak hanya dilakukan untuk mencari anggota baru partai, namun juga terkait dengan persoalan merekrut dan mencalonkan anggota partai untuk menduduki posisi jabatan publik baik dipemerintahan (eksekutif) maupun Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif). Partai politik seharusnya melakukan rekrutmrn atau kaderisasi sejak dini karena pengkaderan yang baik akan mempengaruhi eksistensi partai politik itu sendiri. Oleh sebab itu partai persatuan pembangunan Kota Malang berusaha membenahi internal dengan melakukan proses pengkaderan yang baik.

Proses pengkaderan yang dilaksanakan DPC PPP Kota Malang dilakukan dengan cara kondisional artinya dilakukan dengan tidak terjadwal, dengan demikian perlu diperhatikan karena kader merupakan aset yang sangat luar biasa karena masa depan partai ada di tangan para kader-kader yang berkualitas.

Pendidikan politik yang telah dilaksanakan oleh PPP sebenarnya sudah berjalan meskipun dirasa belum begitu maksimal, sejatinya pendidikan politik yang diberikan kepada kader dan masyarakat umum sangat berpengaruh kepada perolehan suara partai itu sendiri. Selain itu pendidikan politik pada kader sangat berpotensi menjadikan kader lebih berkualitas dan berintegritas yang bisa membawa kemajuan organisasi partai tersebut.

Sebenarnya yang harus menjadi perhatian bersama oleh struktur kepengurusan adalah kebanyakan kader yang tergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan orang-orang yang sudah berusia lanjut, hal ini karena Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Malang sangat keterbatasan anggaran karena dana bantuan politik yang didapatkan hanya sedikit, untuk berlangsungnya kaderisasi Partai Persatuan Pembngunan selama ini hanya mengandalkan iuran kader partai yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. Oleh sebab itu, kaderisasi kurang begitu signifikan untuk merekrut pemuda-pemuda milineal untuk menjadi kader Partai. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Malang Bapak H. Abdul Rozaq, SM pada tanggal 5 April 2019 (hasil wawancara) mengatakan;

“Kaderisasi dan pelaksanaan pendidikan politik belum begitu berjalan dengan baik hal ini disebabkan keterbatasan anggaran yang kami miliki, jadi kami untuk melaksanakan kaderisasi dan pendidikan politik hanya

mengandalkan iuran oelh anggota dewan yang dari partai persatuan pembangunan Kota Malang dan iuran sukarela para pengurus struktural, biasanya ada yang ngasih air mineral, ada yang nyumbang kopi dan teh, camilan dan lain-lain”<sup>4</sup>

Kaderisasi dan pendidikan politik adalah dua hal yang tidak dapat terpisahkan dan sangat berpengaruh demi tetap berjayanya partai politik. Maju mundurnya suatu organisasi atau partai politik tergantung pada kader-kader dan bagaimana pembinaanya. Dalam hal ini partai persatuan pembangunan Kota Malang lebih mengedepankan sistem kaderisasi kekeluargaan dan pendidikan politik dilaksanakan sesederhana mungkin karean terhambat oleh keadaan keuangan partai itu sendiri.

### **Pelatihan Saksi**

Sejak awal berdirinya partai persatuan pembangunan tahun 1973, partai persatuan pembangunan selalu terlibat aktif dalam kegiatan politik baik di tingkat pusat maupun pada tingkat daerah atau lokal. Partai persatuan pembangunan Kota Malang berusaha menghidupkan lagi badan-badan otonom serta lembaga organisasi yang dekat dengan Partai pesatuan pembangunan Kota Malang seperti Aliansi Muda Ka’bah (AMK), Gerakan Muda Ka’bah (GMK) dan Ikatan Santri Ka’bah (ISKAK). Selain itu Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Malang juga membentuk kelompok kader yang diberi nama Forum Komunikasi Anggota, yang anggotanya terdiri dari dari kader-kader di setiap ranting di seluruh Kota Malang. Meski demikian kenapa perolehan suara akhir-akhir ini semakin hilang dan tergerus. Hal ini disebabkan karena sistem pengkaderan partai persatuan pembangunan belum begitu maksimal apalagi 3 tahun akhir ini Partai persatuan pembangunan di timpa konflik internal yang cukup panjang sehingga berakibat pada kaderisasi yang kurang maksimal dan juga mempengaruhi kualitas dan krisis kader itu sendiri. Seperti yang di katakan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak<sup>2</sup>H. Abdul Rozaq, SM Selaku Ketua DPC PPP Kota Malang, pada Tanggal 5 April 2019.

Persatuan Pembangunan Kota Malang H. Abdul Rozaq, SM pada tanggal 31 Maret 2019 (hasil wawancara) mengatakan;

“Terkait rekrutmen dan kaderisasi partai persatuan pembangunan Kota Malang sudah ada yang menangani atau yang bertanggung jawab yaitu bidang organisasi, keanggotaan dan kaderisasi yang di ketuai oleh bapak Mohammad Abu Tazid, dan perkaderan yang terbaru dilaksanakan pada bulan juli 2017 sesuai dengan instruksi Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Persatuan Pembangunan Kota Malang berhasil mendata sekitar 800 kader baru dari semua ranting yang ada di Kota Malang. Untuk itu kader baru tersebut dilatih dan diberi arahan tentang tugas dan fungsi partai politik”<sup>4</sup>

Dalam hal ini, partai persatuan pembangunan Kota Malang telah melakukan rekrutmen kader atau kaderisasi dan memang seharusnya perlu diperhatikan dengan baik masa depan partai ada pada kualitas dan kuantitas kader, partai persatuan pembangunan Kota Malang memberikan beberapa syarat atau mekanisme untuk menjadi kader, seperti yang di katakan oleh Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Moh. Abu Tazid, S.Sos., M.Si pada tanggal 2 April 2019 (hasil wawancara) mengatakan;

“Untuk menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan sangatlah mudah yaitu hanya dengan mengisi formulir pendaftaran, melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk, melampirkan Past Foto ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar, dan senggang waktu maksimal 2 bulan akan diterbitkan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan sah menjadi kader partai persatuan pembangunan”.<sup>4</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ketua Bidang Organisasi, keanggotaan dan Kaderisasi tersebut untuk menjadi anggota atau kader Partai Persatuan Pembangunan Kota Malang sangatlah mudah. Namun yang menjadi perhatian yang utama setelah kader tersebut sah atau menjadi warga Partai Persatuan Pembangunan, kader tersebut harus benar-benar di bina dan dilatih agar kader tersebut mejadi kader yang militan, loyalitas, berintegritas serta berkualitas. Untuk mewujudkan hal seperti itu Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan menyelenggarakan pendidikan

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak<sup>3</sup>H. Abdul Rozaq, SM selaku Ketua DPC PPP Kota Malang, pada Tanggal 31 Maret 2019.

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak<sup>4</sup>Moh. Abu Tazid, S.Sos., M.Si selaku Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi DPC PPP Kota Malang, pada Tanggal 2 April 2019.

politik kepada kader dan masyarakat umum yang merasa terpancang untuk ikut serta aktif dalam kegiatan politik. Seperti memberikan pelatihan menjadi saksi yang nantinya akan diikuti sertakan menjadi tim pemantau pemilu ataupun saksi internal partai.

Partai persatuan pembangunan menuntut kepada seluruh kader baik yang sudah lama ataupun yang masih baru bergabung untuk menjadi kader yang diinginkan dan dicita-citakan partai yaitu yang bisa bekerja dengan sepenuh hati serta jujur dan ikhlas. Seperti yang di kemukakan oleh salah satu kader Partai Persatuan Pembangunan di Kecamatan Kedungkandang Bapak Efendi Pranata tanggal 3 April 2019 (hasil wawancara) mengatakan;

“Menjadi salah satu anggota kader dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Malang adalah keinginan saya sendiri, dan tidak ada paksaan dari orang lain meskipun menjadi kader baru saya rasa agak berat, karena harus mengikuti berbagai kegiatan pendidikan politik seperti pelatihan kader tentang wawasan menjadi saksi di tempat pemungutan suara, mengikuti pertemuan yang diadakan oleh DPC PPP Kota Malang dan kami dituntut untuk bisa mengajak warga yang belum ikut ke PPP supaya ikut bergabung ke Partai ini”<sup>4</sup>

Partai persatuan pembangunan Kota Malang memiliki program yang baik karena setiap kader yang baru dituntut untuk ikut aktif dalam kegiatan pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan seperti kegiatan workshop, sosialisasi program partai, sosialisasi peraturan daerah, sosialisasi aturan perundang-undangan serta pelatihan untuk menjadi saksi di pemilihan umum. Dengan demikian diharapkan kader bisa ikut bertanggung jawab kepada kejayaan partai ataupun bertanggung jawab sosial kepada masyarakat luas.

### **Seminar dan Dialog Interaktif (Perspektif Hukum dalam penyelenggaraan serta Kesiapan Penyelenggara dalam Pemilu Legislatif)**

Salah satu bentuk kegiatan dalam pendidikan politik yaitu dengan seminar bagi anggota atau kader partai. Kegiatan tersebut seperti diskusi untuk mengkaji suatu permasalahan serta mencoba memecahkan permasalahan tersebut. Dalam acara seminar tersebut tidak hanya mengangkat isu-isu politik namun juga isu-isu yang

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak<sup>5</sup>Efendi Pranata, selaku kader PPP Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, pada Tanggal 3 April 2019.

berkembang dimasyarakat. Seminar tersebut mempunyai muatan pendidikan politik yang terkandung didalamnya, yaitu terciptanya pemahaman bagi kader atas berbagai permasalahan yang berkembang dimasyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Kaderisasi Bapak Suryo Santoso, S.T tanggal 1 November 2019 (hasil wawancara) mengatakan:

“untuk kegiatan seminar yang dilakukan oleh DPC PPP Kota Malang pada tanggal 12 Januari 2019 dengan tema “ Perspektif Hukum dalam penyelenggaraan serta Kesiapan Penyelenggara dalam Pemilu Legislatif” seminar tersebut di Hadiri oleh waketum PP yaitu Bapak Arwani Thomafi, untuk peserta yang hadir pada seminar tersebut yaitu semua pengurus dan kader PPP di Malang Raya.<sup>4</sup> <sup>6</sup>

Dari hasil wawancara dengan ketua bidang keanggotaan dan kaderisasi tersebut DPC PPP Kota Malang telah melaksanakan kegiatan seminar. Pada Pemilu legislatif serta pemilu Presiden dan wakil presiden tanggal 17 April 2019, akan dilaksanakan serentak diseluruh tana air dengan mencoblos 5 kertas suara yaitu memilih Pasangan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR-RI, DPD-RI, DPR-D Provinsi dan DPR-D Kota/Kabupaten, untuk itu perlu dilaksanakan secara maksimal dan perlu adanya sosialisasi yang baik dan melibatkan semua pihak.

Kota Malang sebagai wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang padat dan karakter masyarakat yang begitu kompleks, maka DPC PPP Kota Malang perlu adanya pembelajaran atau edukasi kepada kader terhadap persiapan pemilu 2019 yang aman damai serta jauh dari konflik dan perpecahan. Tujuan dari kegiatan tersebut yaitu supaya kader PPP Kota Malang mengerti dan mampu memahami adanya ancaman perpecahan serta adanya konflik menjelang pemilu yang bisa mengganggu persatuan dan keutuhan bangsa.

### **Kajian (Dakwah Agama Oleh Partai Politik)**

Kajian merupakan aktifitas untuk memperluas dan memperdalam wawasan anggota, kajian yang dilaksanakan oleh DPC PPP Kota Malang diantaranya adalah membahas masalah-masalah terkait politik, masalah ke-islaman dan lain-lain. kajian tersebut dihadiri oleh kader-kader serta masyarakat umum dan kajian tersebut dipimpin oleh Kiyai atau Ustadz. Pelaksanaan kajian tersebut biasanya bertempat di

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak<sup>6</sup>Suryo Santoso, ST selaku Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Kaderisasi.



masjid-masjid atau rumah dari kader PPP dan juga bisa giliran. Tujuan dilaksanakan kajian tersebut yaitu untuk menambah dan mempertajam wawasan tentang keagamaan, politik dan berbagai macam permasalahan yang lain. seperti yang dikemukakan oleh Ketua DPC PPP Kota Malang H. Abdul Rozaq, SM. Pada tanggal 1 November 2019 (Hasil wawancara) mengatakan:

“pendidikan politik yang dilakukan oleh PPP Kota Malang yaitu dengan melaksanakan kegiatan seperti dilakukan pada bulan puasa yaitu kami para pimpinan partai melakukan sholat taraweh di beberapa masjid yang ada di kota malang, dan kami juga memberi ceramah atau kajian-kajian agama setelah sholat tarweh tersebut dilakukan. Pada waktu itu tema kajian yang kami berikan pada jamah sholat taraweh yaitu dakwah agama oleh partai politik”.<sup>4</sup>

PPP merupakan partai politik yang berasaskan islam, posisi agama yang demikian itu juga tercermin dalam program-program kerja partai serta usaha untuk memperjuangkan aspirasi umat islam. Agama dan politik tidak bisa dipisahkan dengan alasan apapun karena agama menjadi dasar, membimbing dan sebagai kontrol perilaku politik. Sehingga diharapkan para politisi harus mengedepankan perilaku politik yang akhlakul karimah. Jadi kalau dilihat, memang PPP selalu mengedepankan sikap yang baik serta beramar ma'ruf nahi munkar. Selain itu PPP memposisikan agama sebagai motifasi dalam berpolitik namun politik bukan menjadi tujuan akhir, melainkan politik sebagai sarana mencapai tujuan yang lebih baik untuk kemaslahatan masyarakat luas.

#### **Kegiatan Sosial (Fooging/pemberantasan sarang nyamuk)**

Kegiatan ini merupakan salah satu program pendidikan politik yang ditekankan kepada kader, karena program ini langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kader-kader PPP Kota Malang ditekankan untuk ikut aktif melakukan berbagai aktivitas kegiatan sosial, hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai sehingga dukungan kepada partai bisa semakin bertambah. Bentuk-bentuk kegiatan sosial tersebut seperti membersihkan masjid-masjid, mushola bahkan tempat ibadah lainnya. Selain itu kader PPP juga ikut aktif dalam kegiatan bakti sosial seperti kegiatan fogging gratis, membantu

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak<sup>7</sup>H. Abdul Rozaq, SM, selaku Ketua DPC PPP Kota Malang, pada Tanggal 1 November 2019.

mencarikan dana untuk pembangunan masjid serta membantu pembangunan rumah bagi warga yang kurang mampu. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu warga kelurahan Oro-oro dowo Pak Gebby pada tanggal 1 November 2019 menyatakan:

“fogging atau pemberantasan sarang nyamuk yang dilakukan PPP ini merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kami dan ini merupakan pertama kali yang dilakukan oleh partai yang sangat peduli terhadap masyarakat. Dengan adanya fogging gratis ini bisa lebih mencegah adanya penyakit demam berdarah yang dibawa oleh nyamuk. Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada PPP Kota Malang”.<sup>4</sup>

Kegiatan sosial atau bakti sosial yang telah dilakukan oleh DPC PPP Kota Malang tersebut meski tidak langsung digolongkan kampanye namun mempunyai pesan-pesan politik. Melalui kegiatan tersebut diharapkan bisa mempengaruhi sikap warga masyarakat supaya saat pemilu nanti bisa memilih PPP. Program kegiatan sosial merupakan salah satu cara partai dalam mewujudkan program pendidikan politik dengan meningkatkan citra politik jangka pendek yang khas kampanye.

Berdasarkan hasil penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang pada Pemilu Legislatif Tahun 2019, untuk Kota Malang di bagi menjadi lima Daerah Pemilihan yaitu Daerah Pemilihan 1 (satu) Kecamatan Kedung Kandang, Daerah Pemilihan 2 (dua) Kecamatan Sukun, Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kecamatan Klojen, Daerah Pemilihan 4 (empat) Kecamatan Lowokwaru dan Daerah Pemilihan 5 (lima) Kecamatan Belimbing.

**Tabel 1**  
**Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019**  
**Anggota DPRD Kota Malang**

PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN					JUMLAH
	DP 1	DP 2	DP 3	DP 4	DP 5	
1. Partai Kebangkitan Bangsa	7.908	14.341	21.169	12.684	9.507	65.609
2. Partai Gerindra	5.351	10.522	13.400	9.827	6.298	45.398
3. PDI Perjuangan	10.912	22.945	22.553	30.017	22.574	109.001
4. Partai Golkar	3.770	8.911	7.968	6.423	7.633	34.705

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak<sup>8</sup>Gebby selaku warga Kelurahan Oro-oro Dowo Kota Malang, pada Tanggal 1 November 2019.

5. Partai Nasdem	7.017	4.372	4.476	8.105	4.349	28.319
6. Partai Garuda	0	0	0	0	0	0
7. Partai Berkarya	702	1.282	1.662	1.611	1.465	6.722
8. Partai Keadilan Sejahtera	7.046	10.662	6.802	10.605	14.922	50.037
9. Partai Perindo	2.359	4.391	3.975	4.832	2.064	17.621
10. Partai Persatuan Pembangunan	425	3.862	4.382	2.073	849	11.591
11. Partai Solidaritas Indonesia	3.413	4.179	2.355	4.562	4.938	19.447
12. Partai Amanat Nasional	3.030	7.167	6.548	2.514	8.520	27.779
13. Partai Hanura	1.057	565	651	3.584	608	6.465
14. Partai Demokrat	3.488	7.872	11.892	11.398	4.422	39.072
19. Partai Bulan Bintang	203	374	257	226	1.510	2.570
20. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	0	0	0	0	0

Sumber: Data KPUD Kota Malang, 2019

Dilihat dari perolehan suara tahun 2019 suara PPP Kota Malang turun drastis hal ini disebabkan adanya Tsunami politik elit PPP yaitu tertangkapnya Ketua Umum PPP Romy Roahurmuzi kasus korupsi, kejadian tersebut tepat kurang dari 2 bulan menjelang pemilu legislatif 2019.

Dari perolehan suara legislatif pada pemilu 2019 maka partai-partai yang mendapatkan kursi legislatif di DPRD Kota Malang periode 2019-2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Hasil Perolehan Kursi Legislatif Pemilu 2019**  
**Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang**

No.	Nama Partai	Jumlah Perolehan Kursi
1	Partai Kebangkitan Bangsa	7
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	5
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	12
4	Partai Golongan Karya	5
5	Partai Nasional Demokrat	2
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	0
7	Partai Berkarya	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	6
9	Partai Persatuan Indonesia	1
10	Partai Persatuan Pembangunan	0
11	Partai Solidaritas Indonesia	1
12	Partai Amanat Nasional	3
13	Partai Hati Nurani Rakyat	0
14	Partai Demokrat	3
19	Partai Bulan Bintang	0
20	Partai Keadilan dan persatuan Indonesia	0
	<b>Jumlah</b>	<b>45</b>

Sumber: Data KPUD Kota Malang, 2019.

**Tabel 3**  
**Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2014**  
**Anggota DPRD Kota Malang**

PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN					JUMLAH
	DP 1	DP 2	DP 3	DP4	DP 5	
1. Partai Nasdem	3.140	3.699	1.371.	5.256	2.739	16.205
2. Partai Kebangkitan Bangsa	14.832	10.047	5.803	8.403	11.816	50.906
3. Partai Keadilan Sejahtera	8.600	4.146	2.456	6.053	4.827	26.082
4. PDI Perjuangan	19.498	24.027	9.730	17.243	21.179	91.647
5. Partai Golkar	7.576	12.425	6.658	6.562	7.243	40.464
6. Partai Gerindra	13.520	7.234	3.911	7.258	7.862	39.785
7. Partai Demokrat	5.151	6.364	5.017	8.610	8.694	33.836
8. Partai Amanat Nasional	6.414	4.637	4.506	4.855	6.750	27.162
9. Partai Persatuan Pembangunan	6.904	4.739	1.766	2.394	7.470	23.273
10. Partai Hanura	3.213	8.216	7.157	6.422	2.999	28.007
14. Partai Bulan	357	3.646	426	1.427	796	6.652

Bintang						
15. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	248	771	302	825	1.199	3.345

*Sumber: Data KPUD Kota Malang, 2014*

Dari perolehan suara legislatif pada pemilu 2014 maka partai-partai yang mendapatkan kursi legislatif di DPRD Kota Malang periode 2014-2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4**

**Hasil Perolehan Kursi Legislatif Pemilu 2014  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang**

No	Nama Partai	Jumlah Perolehan Kursi
1	Partai Nasional Demokrat	1
2	Partai Kebangkitan Bangsa	6
3	Partai Keadilan Sejahtera	3
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11
5	Partai Golongan Karya	5
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	4
7	Partai Demokrat	5
8	Partai Amanat Nasional	4
9	Partai Persatuan Pembangunan	3
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3
14	Partai Bulan Bintang	0
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0
	<b>Jumlah</b>	<b>45</b>

*Sumber: Data KPUD Kota Malang, 2014.*

Dilihat dari perolehan suara pada pemilu 2019 menunjukkan hilangnya lebih dari 50% suara pada pemilu tahun 2014. Pada pemilu 2019 Partai Persatuan Pembangunan Kota Malang mendapatkan suara sebesar 11.593 suara dan untuk pemilu 2014 mendapatkan 23.273 suara. selain itu Partai Persatuan Pembangunan Kota Malang pada pemilu legislatif 2019 kehilangan kursi atau tidak mendapatkan kursi sama sekali. Sehingga pada periode 2019-2024 Partai Persatuan Pembangunan tidak memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. Dalam proses persiapan pemilu 2019 Partai Persatuan Pembangunan Kota Malang sebenarnya sudah baik, namun yang menjadi petaka besar adalah anggota DPRD Kota Malang Periode 2014-2019 secara keseluruhan tersandung kasus Korupsi massal termasuk ke Tiga anggota yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan.

Hal ini yang menyebabkan turun drastis perolehan suara Partai. Dalam hal ini, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kota Malang H. Abdul Rozaq, SM pada 12 Mei 2019 (hasil wawancara) mengatakan;

“Sebenarnya kami para pengurus mulai dari ranting Kelurahan sampai tingkat Kota sudah totalitas bekerja untuk suksesi Pemilu 2019, namun sekitar 1 tahun sebelum pemilu kan Kota Malang kena badai yang luar biasa, yaitu terjeratnya kasus hukum seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dan disitu juga ada 3 anggota dewan yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan termasuk Walikotanya yaitu Abah Anton, dan akhirnya berimbas pada pemilu 2019 Partai Persatuan Pembangunan kehilangan kursi atau tidak mendapatkan kursi perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR-D) Kota Malang”.<sup>4</sup>

Hal senada juga dikemukakan oleh Ketua Pemenangan Daerah Pemilihan 1 kecamatan Kedung Kandang Bapak Misbach Matturiyanto pada 12 Mei 2019 (hasil wawancara) mengatakan;

“Memang untuk pemilu 2019 ini kami merasa berat dengan tidak henti-hentinya badai yang melanda partai kami, belum selesainya kasus Anggota Dewan yang tersangkut Korupsi malah ditambahi lagi kasus yang sangat besar yaitu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Bapak Romy Rhomahurmuzy juga Terjaring KPK dengan kasus yang sama yaitu Korupsi, bahkan kasusnya tidak tanggung-tanggung yaitu berkaitan dengan jual beli jabatan di wilayah Kementrian Agama Jawa Timur. Menteri Agamanya sendiri dari Partai Persatuan Pembangunan, lantas bagaimana perasaan masyarakat dan kader itu sendiri”.<sup>5</sup>

Kondisi seperti inilah yang menyebabkan suara PPP Kota Malang turun drastis. Pendidikan politik yang selama ini dijalankan oleh partai seakan-akan tidak ada gunanya sama sekali. Bahkan partai yang berasaskan Islam seperti PPP ini masih juga tersandung dengan kasus korupsi apalagi yang terjerat adalah ketua umumnya dan yang memprihatinkan lagi sudah dua Ketua Umum PPP yang tersangkut kasus korupsi, yang pertama yaitu mantan Menteri Agama yaitu Bapak Surya Dharma Ali (SDA). Surya Dharma Ali pada waktu itu tersangkut kasus korupsi terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013 dan di tuntutan 11 tahun penjara karena telah merugikan keuangan Negara sebesar 27.283.090. Selaku Pejabat Negara atau Menteri Agama beliau seharusnya terbebas dari niat dan perbuatan yang menyimpang

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak<sup>9</sup>Abdul Rozaq, SM. Selaku Ketua DPC PPP Kota Malang, pada Tanggal 12 Mei 2019.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak<sup>6</sup>Misbach Matturiyanto selaku Ketua Pemenangan Daerah Pemilihan I Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, pada Tanggal 12 Mei 2019.

dan sebagai Ketua Partai yang berasaskan Islam harus menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan kejujuran. Sedangkan kasus yang menimpa Ketua Umum PPP Bapak Romahurmuzy yaitu terkait suap jual beli jabatan di lingkungan kementerian Agama Jawa Timur. Romi ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik Muhammad Muwafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanuddin. Mantan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan itu di duga menerima suap sebesar 300 juta.

Berdasarkan perolehan suara pada pemilu 2014 yang lalu, PPP Kota Malang mendapatkan 23.273 suara dan berhasil mendapatkan 3 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang untuk periode 2014-2019. Hal itulah yang menjadi tolak ukur pada pemilu 2019, PPP Kota Malang melakukan berbagai acara atau kegiatan pendidikan politik kepada kader dan pengurus dari tingkat Ranting Kelurahan sampai dengan pengurus tingkat Cabang Kota Malang. Salah satu contoh pelaksanaan pendidikan politik yang di selenggarakan DPC PPP Kota Malang adalah melakukan pelatihan untuk menjadi saksi pada pemilu legislatif kepada kader, acara tersebut kerja sama dengan DPW PPP Jawa Timur dan DPP PPP.

Kota Malang dibagi menjadi 5 daerah pemilihan, pada pemilu 2019 ini PPP menargetkan 10 kursi dengan tiap-tiap Daerah Pemilihan (Dapil) memperoleh 2 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. Jumlah target perolehan suara PPP Kota Malang mungkin jauh dari hasil perolehan suara pada pemilu 2014, hal ini yang menjadikan semangat kepada kader-kader Partai untuk bisa mengoptimalkan kerja cepat dan bisa memaksimalkan peran partai dalam pelaksanaan pendidikan politik. Seperti yang di kemukakan oleh Bapak Abdul Rozaq, SM pada tanggal 31 Maret 2019 (hasil wawancara) mengatakan;

“memang pada pemilu 2019 yang akan digelar beberapa hari lagi ini, PPP Kota Malang sengaja menargetkan 10 kursi DPRD. Kenapa demikian biar para pengurus partai dari tingkat ranting sampai tingkat Cabang bisa bekerja cepat dan semangat. Dan PPP Kota Malang bisa lebih aktif dan giat untuk turun kemasyarakat dengan mensosialisasikan program dan tujua PPP Kota Malang ini”.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak<sup>1</sup>Abdul Rozaq, SM, Selaku Ketua DPC PPP Kota Malang, pada Tanggal 31 Maret 2019.

Dari hasil wawancara tersebut berkenaan dengan target perolehan suara pada pemilu 2019 ini, PPP Kota Malang membuat hitung-hitungan perencanaan awal dengan pembagian angka dan kursi sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Target Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan**  
**Berdasarkan Lima Daerah Pemilihan**  
**Pada Pemilu legislatif 2019 Kota Malang**

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Pemilih	Jumlah Kursi	Target Suara (%) PPP	Target Suara PPP
1	Klojen	76.978	6	15%	11.545
2	Belimbing	131.596	10	15%	20.175
3	Kedung Kandang	140.265	10	15%	21.036
4	Sukun	144.311	10	15%	21.646
5	Lowokwaru	117.521	9	15%	17.628
	<b>Jumlah</b>	<b>610.671</b>	<b>45</b>		<b>92.030</b>

*Sumber: Data DPC PPP Kota Malang, 2019.*

Dari tabel diatas dapat dilihat untuk pemilu 2019 PPP Kota Malang menargetkan suara 15% di tiap-tiap daerah pemilihan. Metode penghitungan kursi pada pemilu 2019 ini menggunakan metode Sainte-Lague, metode ini diperkenalkan oleh seorang matematikawan asal Prancis bernama Andre Sainte Lague pada tahun 1910. Sementara di Indonesia aturan ini disahkan pada tanggal 21 Juli di DPR-RI dengan menggabungkan tiga Undang-undang pemilu, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Legislatif, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Metode Sainte Lague ini tertuang dalam Pasal 414 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Demi mewujudkan target suara PPP Kota Malang pada pemilu legislatif 2019, perlu mengoptimalkan beberapa hal yang perlu dikerjakan bersama-sama dari



tingkatan Ranting Kelurahan sampai dengan tingkat Cabang Kota Malang. Semua pimpinan yang telah diberi tanggung jawab untuk menjadi ketua bidang pemenangan di tiap-tiap daerah pemilihan untuk bisa mengkoordinasikan kepada seluruh kader untuk bisa ikut aktif memobilisasi masa dan aktif untuk ikut dalam kegiatan pendidikan politik. Selain itu untuk memaksimalkan suara pada pemilu 2019 PPP Kota Malang juga menanamkan sikap cepat, tanggap dan akurat kepada semua pengurus partai terhadap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan citra partai dan rasa kepercayaan masyarakat terhadap PPP semakin tinggi. Dengan demikian target yang di rencanakan oleh Dewan Pimpinan Cabang PPP Kota Malang bisa tercapai dan terlaksana dengan baik.

<b>Pendidikan Politik PPP Kota Malang</b>	<b>2014</b>	<b>2019</b>
Strategi	Media massa, Banner, surat kabar, kajian, pelatihan	Media massa, banner, mendatangi langsung ke rumah-rumah, kajian, Pelatihan
Materi Pendidikan Politik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengamalkan Keislaman untuk Indonesia Maju.</li> <li>2. Pendidikan Etika dan Budaya Politik “Memperkuat peran kader dan masyarakat dalam mendukung agenda Demokrasi”</li> <li>3. Penyuluhan Pendidikan Politik bagi Pemilih pemula guna meningkatkan partisipasi hak pilih</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persepektif Hukum dalam Penyelenggaraan serta Kesiapan Penyelenggara dalam Pemilu Serentak.</li> <li>2. Pendidikan politik bagi pemilih pemula serta sosialisasi UU Pesantren.</li> <li>3. Dakwah Agama Oleh Partai Politik.</li> </ol>

	pada pemilu legislatif tahun 2014. 4. Sosialisasi Program PPP Berdasarkan Visi dan Misi Partai.	4. Sosialisasi Program PPP Berdasarkan Visi dan Misi Partai.
Sasaran	Kader, Masyarakat Umum, dan Generasi Pemilih pemula.	Kader, Masyarakat Umum, dan Generasi Pemilih pemula

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat untuk metode pendidikan politik tahun 2014 dan 2019 hampir sama, yaitu dengan menggunakan media massa, pelatihan, kajian dll. Tujuan pendidikan politik memberikan pedoman kepada generasi muda untuk meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menciptakan generasi muda yang berkualitas.

#### **Pendidikan Politik Kepada Masyarakat (Eksternal Partai)**

Tantangan partai politik kedepan yaitu mengembalikan dan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat. Kalau dilihat akhir-akhir ini masyarakat sudah mulai acuh, jenuh, menjauh dan tidak percaya kepada partai politik. Apabila kondisi seperti ini tidak segera diatasi, lama kelamaan masyarakat akan meninggalkan partai politik dan hal ini akan membahayakan sistem demokrasi kedepan. Tantangan partai politik kedepan terutama mengembalikan kepercayaan publik, juga proses politik dan keluhuran politik. Kepercayaan masyarakat tidak akan tercipta atau lahir apabila proses politik masih curang tidak transparan dan saling menyalahkan, selain itu para elit politik juga masih banyak yang tersangkut kasus tidak terpuji seperti kasus korupsi, kasus asusila, fitnah, saling mencela dan juga politik uang. PPP salah satu partai politik tertua dalam sejarah Bangsa. Seyogyanya kader-kader partai politik lebih aktif turun kemasyarakat guna mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Jangan hanya saat menjelang pemilu dilaksanakan baru turun kemasyarakat namun partai politik atau kader partai politik harus mau duduk bersama dan bekerja serta memperjuangkan kepentingan masyarakat umum. Kondisi seperti ini turut menyumbang ketidak berpihakan serta turut melahirkan ketidak

percayaan masyarakat terhadap partai politik. Ketidak transparan keuangan partai politik juga menjadi penyebab masyarakat sudah tidak percaya kepada partai politik. Partai politik juga hanya mementingkan kepentingan partai dan golongannya saja. Salah satu bukti nyata ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik yaitu banyaknya calon Kepala Daerah baik untuk Calon Gubernur maupun Bupati dan Walikota yang berangkat dari perorangan atau Independen.

Berangkat dari asumsi atau hal yang terjadi dimasyarakat tersebut, PPP Kota Malang untuk meningkatkan dan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat kepada partai ini berupaya meningkatkan kegiatan Pendidikan politik yang maksimal dan baik. Selain itu juga memberikan program-program yang Pro atau berpihak kepada rakyat. Berbagai macam cara terus dilakukan oleh PPP untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat melalui pendidikan politik dan masyarakat umum. Untuk itu, pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat tersebut yang berkelanjutan kepada masyarakat melalui beberapa aspek. Pendidikan politik menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, PPP melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai ada tiga cara pendekatan, seperti yang dikemukakan oleh Ketua DPC PPP Kota Malang Bapak H. Abdul Rozaq, SM. pada 3 April 2019 (hasil wawancara) mengatakan;

“Memberikan selebaran terkait program dan keberhasilan PPP kepada forum-forum perkumpulan warga seperti arisan Ibu-ibu PKK, perkumpulan ibu-ibu senam, dan berbagai bentuk perkumpulan lainnya. Selain itu juga menyiarkan ke Radio lokal untuk menginformasikan berbagai agenda yang telah disusun oleh Partai. PPP Kota Malang juga memberikan penyuluhan dan pelatihan berwirausaha kepada masyarakat umum”.<sup>5</sup>

Dengan datangnya pemilu yang akan dilaksanakan beberapa hari lagi PPP harus bisa merapatkan barisan, meningkatkan soliditas, menumbuhkan solidaritas, bekerja ikhlas, serta meneruskan regenerasi kepemimpinan serta melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat umum demi tercapainya dua tujuan yaitu suksesi pemilu legislatif dan suksesi pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dengan melaksanakan pendidikan politik yang baik tentu saja yang diharapkan partai yaitu untuk mempertahankan suara pada pemilu 2014 yang berhasil memperoleh 23.273

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak<sup>2</sup>H. Abdul Rozaq, SM, pada tanggal 3 April 2019.

suara, untuk para pengurus diharapkan selalu konsolidasi kepada semua tingkatan mulai dari tingkat cabang hingga ranting.

Terkait itu pendidikan politik yang baik kepada masyarakat merupakan instrumen penting untuk mengajak masyarakat agar simpatik kepada PPP. Pelaksanaan pendidikan politik dapat dilaksanakan dimanapun artinya yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat seperti menyampaikan visi misi partai, program perjuangan partai, beberapa keberhasilan partai dan mensosialisasikan aturan perundang-undangan yang telah di buat. Dalam hal menumbuhkan dan menciptakan kesadaran masyarakat terhadap partai politik, PPP Kota Malang melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat antara lain:

#### **Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula (Milenial)**

Pendidikan politik hendaknya dilaksanakan dengan salah satu sasaran pesertanya yaitu pemilih pemula atau milenial. Kegiatan ini merupakan sarana pembelajaran bagi pemuda-pemudi Kota Malang yang menjadi pemilih pemula agar mengetahui etika dan moral politik. Sebagai pemilih pemula diharapkan bisa mengetahui etika dan moral politik selain itu juga sebagai sarana untuk memberikan kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga Negara yang turut berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi berbangsa dan bernegara. Dengan kegiatan pendidikan politik ini para pemuda bisa menyalurkan pengetahuannya kepada para pemilih lainnya sehingga bisa tercipta demokrasi yang baik dan berkualitas demi masadepan demokrasi yang lebih baik. Seperti yang dikatakan salah satu peserta dalam acara tersebut yaitu Dadang Nova Prasaja warga Kelurahan Sawojajar Kecamatan Belimbing pada tanggal 9 April 2019 (hasil wawancara) mengatakan;

“Dengan adanya sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula ini saya sekarang semakin mengerti dan mempunyai gambaran mengenai politik. Sebelum ini saya tidak tau mekanisme memberikan suara yang baik seperti apa namun setelah kegiatan itu saya semakin cakap dan percaya diri untuk turut serta mengawasi proses pemilu legislatif yang akan datang. Saya akan menggunakan hak saya untuk memilih nanti dan menjadi pemilih cerdas”.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak<sup>3</sup> Dadang Nova Prasaja selaku Peserta warga Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Belimbing Kota Malang, pada tanggal 9 April 2019.

Tentu tidaklah mudah mengajak para pemilih pemula untuk mempengaruhi atau memberikan pemahaman politik kepada masyarakat pemilih pemula; ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman politik bagi masyarakat yaitu, faktor lingkungan, faktor jenis kelamin, faktor tingkat pendidikan formal dan faktor keturunan. Pendidikan politik berperan penting sebagai media penyampaian konsep politik yang memiliki tujuan akhir untuk membuat pemilih pemula menjadi melek politik. Pemilih pemula yang baik yaitu mereka yang melek politik atau yang memahami konsep perpolitikan yang sadar akan hak dan kewajiban sehingga dapat ikut serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam setiap proses pembangunan. Pendidikan politik diperlukan terutama untuk mendidik generasi muda saat ini yang nantinya akan menjadi generasi penerus dan pelurus bangsa.

Pemilih pemula pada dasarnya memiliki pemikiran yang sangat dinamis, masih belum memiliki pondasi yang kuat. Hal ini terjadi karena pemilih pemula masuk dalam kategori anak remaja atau yang baru akan merasakan ikut serta dalam pemilihan umum. Pemuda pada dasarnya memiliki pola yang kurang kuat karena masih banyak yang mencari bentuk yang sesuai dengan dinamika yang sedang berkembang saat ini, dan masih banyak yang belum memiliki karakter yang kuat. Hal ini tidak menjadi hambatan bagi para pengurus partai yang akan membantu generasi muda untuk memiliki pengetahuan yang luas dan perilaku yang baik sesuai dengan kultur dan budaya politik yang baik.

#### **Sosialisasi Program PPP Berdasarkan Visi dan Misi Partai.**

Sosialisasi program partai merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh partai politik untuk memperkenalkan program kepada masyarakat luas, seperti yang dilakukan PPP Kota Malang yaitu dengan cara melaksanakan kegiatan yang benar-benar bersentuhan dengan masyarakat seperti diantaranya: melakukan kegiatan kerja bakti, pengajian akbar yang diselenggarakan di kantor Partai, ceramah-ceramah agama, pemberian santunan kepada anak yatim piatu, membantu dalam bencana alam, dan melaksanakan program pengobatan gratis kepada masyarakat yang membutuhkan serta membantu dalam pengurusan hal administrasi kependudukan dan BPJS Kesehatan. Program yang diselenggarakan oleh PPP Kota Malang sifatnya hanyalah situasional tergantung kebutuhan masyarakat dan melihat kondisi

keuangan partai. Untuk mengkondisikan peserta dalam program partai tersebut Partai berkoordinasi dengan Ketua Ranting di masing-masing Kelurahan se-Kota Malang.

Sesuai dengan Visi dan Misi PPP “Terwujudnya masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wata’ala dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokrasi, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, serta menjunjung tinggi harkat martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman. Partai politik bisa dikatakan sukses dan berhasil apabila mendapat kepercayaan dan simpatik dari masyarakat. Salah satu fungsi partai politik yaitu melaksanakan sosialisasi politik, proses pembentukan dan menanamkan sikap dan orientasi politik kepada masyarakat luas. Selain itu PPP Kota Malang juga menyampaikan program partai seperti kursus kepemimpinan, diskusi untuk menyikapi isu yang sedang berkembang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada partai sehingga pada saat pemilu bisa memilih PPP. Seperti yang dikatakan oleh Ketua DPC PPP Kota Malang Bapak H. Abdul Rozaq, SM pada tanggal 8 April 2019 (hasil wawancara) mengatakan;

“kegiatan sosialisasi program partai ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat serta mensosialisasikan visi dan misi partai, supaya masyarakat mengetahui semua program yang direncanakan partai”.<sup>5</sup>

Sudah seharusnya partai politik selalu mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan golongan. Partai politik merupakan organisasi yang didirikan yang bersifat nasional dan mempunyai tujuan untuk menjembatani kepentingan rakyat. Namun juga tidak sedikit partai politik yang pragmatis dan hanya mementingkan golongannya sendiri dan hanya memanfaatkan masyarakat menjelang pemilu dilaksanakan. Dengan demikian PPP Kota Malang mempunyai program taktis untuk meningkatkan perolehan suara partai pada pemilu yang akan datang.. seperti ang dikatakan oleh wakil ketua yang membidangi Organisasi dan kaderisasi bapak Surya Santoso, ST tanggal 4 April 2019 (hasil wawancara) mengatakan”

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak<sup>4</sup>H. Abdul Rozaq, SM selaku Ketua DPC PPP Kota Malang, pada tanggal 8 April 2019.

“kami selalu berkoordinasi kepada pengurus partai untuk membicarakan program yang akan diselenggarakan, dan yang telah kami lakukan dalam sosialisasi program partai tersebut, kami bagi menjadi dua program yaitu, program jangka pendek untuk pembenahan struktural kepengurusan dan program jangka panjang partai yaitu mempersiapkan kader yang berkualitas untuk bisa menjadi pemimpin yang amanah”.<sup>5</sup>

5

Masyarakat Kota Malang kebanyakan masyarakat terpelajar namun belum begitu kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, hal ini sangatlah kurang baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu PPP Kota Malang diharapkan mampu menciptakan atau menumbuhkan sikap kritis masyarakat tersebut supaya juga ikut mengawasi kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Selain itu Partai Persatuan Pembangunan diharapkan benar-benar konsisten untuk memperjuangkan kepentingan rakyat sehingga terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

#### **Kampanye Dengan Memanfaatkan Media Elektronik dan Atribut Lainnya**

Untuk meningkatkan program kerja organisasi partai dan untuk meningkatkan simpatik masyarakat, PPP Kota Malang mempunyai beberapa cara yaitu dengan mensosialisasikan program perjuangan partai melalui selebaran pamflet yang disebar ditempat-tempat keramaian, dan tulisan-tulisan yang bertujuan untuk membangun opini masyarakat sehingga masyarakat terdorong untuk mencari tahu tentang partai persatuan pembangunan. Selain itu juga memanfaatkan media elektronik seperti radio dan televisi lokal yang ada di Malang hal ini dianggap ampuh untuk menyampaikan program atau berkampanye mengenalkan partai kepada semua orang. PPP Kota Malang juga melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga untuk mengkampanyekan program perjuangan serta mengenalkan partai kepada warga masyarakat, dengan demikian masyarakat akan semakin senang dan merasa dihargai dan diperhatikan dan dibutuhkan oleh PPP Seperti yang dikatakan oleh Ketua DPC PPP Kota Malang Bapak Abdul Rozaq, SM. Tanggal 7 April 2019 (hasil wawancara) mengatakan;

“Metode kampanye yang dilakukan PPP tidaklah begitu jauh seperti yang dilakukan oleh partai-partai peserta pemilu yang lain, namun kami lebih sering dan condong untuk datang ke rumah-rumah warga, biasanya itu dilakukan oleh calon anggota dewan dan didampingi oleh ketua Bidang pemenang disetiap daerah pemilihannya masing-masing.

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak<sup>5</sup> Suryo Santoso, ST selaku Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi pada tanggal 4 April 2019.

Dengan begitu kami lebih dekat dengan masyarakat dan masyarakat juga merasa lebih diperhatikan”.<sup>5</sup>

Kampanye merupakan salah satu bentuk dari pendidikan politik kepada masyarakat, kegiatan kampanye tersebut dimanfaatkan oleh partai-partai peserta pemilu seperti halnya PPP Kota Malang. Hal ini bertujuan untuk menginformasikan program-program kerja dan perjuangan partai serta memperkenalkan calon anggota dewan kepada masyarakat. Namun yang menjadi perhatian bersama kegiatan ini dilakukan partai hanya menjelang pemilu saja dan tidak ada program berkelanjutan dan seperti tampak hanya memanfaatkan suara masyarakat. Padahal masyarakat ingin kegiatan pendidikan politik seperti penyampaian program kerja serta kegiatan apapun terkait politik ingin dilaksanakan terus menerus sepanjang tahun. Selain mendatangi rumah-rumah warga, PPP Kota Malang juga memanfaatkan pemasangan atribut-atribut partai melalui media masa. Hal ini bertujuan untuk menyasar dukungan dari kalangan milenial, karena dengan menggunakan metode media ini para pemuda atau kaum milenial mudah mengakses dan mengenali program partai dan program kerja serta visi-misi dari calon anggota dewan yang berangkat dari partai persatuan pembangunan. Seperti dikatakan oleh Umi Nadhiroh warga Kendalsari Kota Malang pada tanggal 8 April 2019 (hasil wawancara) mengatakan;

“Iya mas menurut saya kampanye partai itu lebih baik dengan mendatangi rumah secara langsung, karena kami sebagai masyarakat merasa dihargai dan sekaligus kami juga bisa menyampaikan uneg-uneg atau aspirasi kepada partai untuk bisa diperjuangkan nanti di dewan. Menurut saya mas selain datan ke rumah-rumah untuk kampanye juga lebih baik menggunakan media sosial karena dinilai lebih praktis karena kalau menggunakan spanduk atau banner bisa mengotori jalan dan merusak pemandangan”.<sup>5</sup>

Melalui silaturahmi kepada masyarakat hal ini bertujuan untuk menumbuhkan dan menanamkan ikatan emosional dan rasa kekeluargaan antara masyarakat dengan partai persatuan pembangunan. Apabila antara masyarakat dan partai sudah ada hubungan emosional sangat mungkin warga masyarakat akan bersimpatik kepada Partai Persatuan Pembangunan Kota Malang. Dari hasil

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak<sup>6</sup>H. Abdul Rozaq, SM, selaku ketua DPC PPP Kota Malang, pada Tanggal 7 April 2019.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Umi Ndhiroh warga Kelurahan Kendalsari Kecamatan Lowokwaru, pada tanggal 8 April 2019.



pengamatan peneliti diberbagai kegiatan pendidikan politik PPP Kota Malang tidak begitu memakan anggaran yang banyak, seperti pemilu sebelumnya kegiatan kampanye selalu dilaksanakan di lapangan dan pawai disepanjang jalan hal ini yang dikira sangat memakan anggaran banyak. Dan itu pun belum tentu bisa mendongkrak perolehan suara partai naik. Dengan pengalaman tersebut, untuk itu pada pelaksanaan pemilu serentak 2019 ini PPP Kota Malang lebih fokus mengoptimalkan peran pengurus dan kader untuk lebih aktif turun kemasyarakat supaya perolehan suara partai bisa lebih maksimal.

Berdasarkan penelitian dan dari data-data yang dihasilkan penulis, PPP Kota Malang menekankan 3 unsur dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat, yang *pertama* dengan mendekatkan dan melaksanakan pelatihan kepemimpinan bagi pemilih pemula, yang *kedua* mengoptimalkan sosialisasi program kerja dan visi-misi partai kepada masyarakat umum, yang *ketiga* kampanye dengan mengoptimalkan silaturahmi kepada masyarakat dengan langsung datang kerumah-rumah serta memaksimalkan metode kampanye melalui media sosial.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat kita temukan bahwa pendidikan politik dapat dilaksanakan melalui berbagai cara. Pelaksanaan pendidikan politik tidak hanya dilaksanakan dilingkungan sekolah atau organisasi formal saja, namun bisa saja dilakukan melalui media serta mendatangi kerumah-rumah warga. Karena yang terpenting adalah bahwa bentuk pendidikan politik tersebut mampu untuk meningkatkan partisipasi politik dan kesadaran politik masyarakat.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Implementasi Pendidikan Politik dalam Rangka Meningkatkan Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tinjau Dari Pasal 31 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pendidikan politik yang dilakukan oleh PPP Kota Malang sudah berjalan meskipun kurang begitu maksimal karena pelaksanaan tersebut dilakukan hanya menjelang agenda besar yaitu menjelang Pemilu, hal ini dapat dilihat dari perolehan suara PPP pada Pemilu legislatif Tahun 2019 yang turun drastis dibanding perolehan suara pada Pemilu Legislatif Tahun 2014.

2. Untuk perolehan suara pada pemilu legislatif Tahun 2019 PPP hanya mendapatkan suara sebanyak 11.593 sedangkan pada pemilu 2014 PPP mendapatkan 23.273 suara. Perolehan kursi DPRD Kota Malang pada tahun 2014 PPP mendapatkan 3 kursi DPRD namun pada pemilu 2019 PPP Kota Malang Kehilangan seluruh perwakilan di DPRD.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka ada beberapa yang penulis ajukan dengan tujuan supaya suara PPP Kota Malang bisa kembali berjaya seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya, yaitu:

1. Dalam pelaksanaan pendidikan politik seharusnya memperhatikan kesetaraan gender serta memperhatikan kelompok atau komunitas masyarakat seperti penyandang Disabilitas, komunitas kesenian dan lebih memperhatikan pemilih pemula atau milenia.
2. PPP Kota Malang harus lebih terstruktur dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik jangan hanya menjelang pemilu saja, serta lebih giat dalam mensosialisasikan program kerja partai kepada masyarakat umum.
3. Selain itu penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPUD harus lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan cara melakukan pemungutan suara yang baik dan benar kepada masyarakat umum.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Arbi Sanit.2003. *Sistem Politik Indonesia*.Jakarta: PT Raja Grafindo. Hal.23-24  
Budiman, Ahmad, 2003, *Eksistensi Parpol Islam dalam Pemilu 2004, Dalam Sali, Ed., Susiana, Pemilu 2004: Analisis Politik, Hukum dan Ekonomi*, Jakarta: Tiga Putera Utama  
Daniel Dhakidea. 2004. *Partai-partai Poitik Indonesia Ideologi dan Program 2004-2009*. Jakarta: Kompas Media Nusantara. Hal 101.

Djakfar, Y. 2009. *Pendidikan Politik warga negara dalam menciptakan demokrasi yang berkualitas*. Jurnal online dinamika. 2 (3), hal. 41

Firmansyah HI, 2008. *Pengelola Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Harapandi dan Mansur, 2006. *Pendidikan Politik*. Jakarta:Pustaka Irfani.

Harian Republika, 2019. <http://m.republika.co.id/amp/pr0ax3428>

Haris, Syamsudin, 1991, *PPP dan Politik Orde Baru*, Jakarta: Grasindo, Halaman 48

Ihsan, Bakir, 2016, *idologi Islam dan Partai Politik: strategi PPP dalam Memasukkan Nilai-nilai Islam kedalam Rancangan UU di Era Reformasi*, Jakarta: Orbit Publishing

Imam Hidajat.2009. *Teori-teori Politik*. Malang: Setara Pres

Kartono, K. 2009. *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: Mandar Maju

Kartini Kartono, *Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*, Jakarta: Mandar Maju, 2009:64

Kahfi Ananda, *sejarah perjalanan PPP: Dinamika Politik dalam Mengatasi Konflik Internal Partai*, Journal of Indonesian History 4 (1) (2015). Dalam <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih>.

KPUD Kota Malang.2019. Pemilu 2019.

M. Rusli Karim.1983. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali. Hal,204.

Miirriam Budiarto.2008, *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.

Munawir Ariffin, *sejarah Konflik PPP dimasa Orde Baru*, Journal Pendidikan dan Sejarah Vol.5 No. 1 2019. [http:// Journal.untirta.ac.id](http://Journal.untirta.ac.id).

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta:PT Gramedia, 200

Romli, Lili, 2006, *Islam yes, Partai Islam yes*, Jakarta: Pustaka Pelajar dan Pusat Penelitian Ilmu Politik-LIPI

Rusadi Kantraprawira.2004. *Sistem Politik Indonesia*.Jakarta: Sinar Baru

Sanit. 2003. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta:PT Raja Grafindo

Samuel P Huntington dan Joan M.Nelson, *No Easy Chice: Political Participation in Dveloping Countries* (Cambridge, Mass: Havard University Press, 1977), hal 3).

Ustman Abdul.2001. *Pendidikan Politik Ikwanul Muslimin*. Jakarta:Intermedia

Yulianto Saputro.2015. *Peran Partai Politik dalam Pendidikan Generasi Muda*.  
Jurnal Ketahanan Nasional

LAMPIRAN







